

## Analisis kebijakan 3in1 untuk kebutuhan tenaga kerja dalam negeri melalui pendekatan AHP (the analytic hierarchy process)

Pasaribu, Berton, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20332652&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

Kondisi ketenagakerjaan kita saat ini menunjukkan masih tingginya jumlah pengangguran yaitu sebanyak 9.43 juta orang atau setara dengan 8,46%. Disertai dengan kualitas dan kompetensi tenaga kerja yang menganggur di Indonesia masih relatif rendah sebanyak 4.92 juta orang atau setara dengan 52.17% berpendidikan lulusan SLTP. Artinya lebih dari 50% kualitas tenaga kerja yang menganggur didominasi lulusan SLTP kebawah. Sementara kondisi lembaga pelatihan kerja belum begitu memadai sehingga lulusan pelatihan kerja belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dengan kata lain adanya mismatch antara lulusan pelatihan kerja dengan kebutuhan pasar kerja.

Salah satu kebijakan pemerintah untuk menanggulangi pengangguran di Indonesia adalah dengan melaksanakan program 3in1. Kebijakan program 3in1 merupakan strategi terobosan untuk menggandeng dan memberdayakan lembaga pelatihan, lembaga sertifikasi dan lembaga penempatan menjadi sistem yang terkoordinasi secara terpadu dalam mengurangi pengangguran. Ketiga lembaga terkait harus dilaksanakan dalam satu koordinasi secara terpadu namun dalam pelaksanaannya koordinasi antara ketiga lembaga belum berjalan secara maksimal. Tujuan penelitian dalam tesis ini adalah menggambarkan kondisi pelaksanaan program 3in1 untuk kebutuhan tenaga kerja dalam negeri yang telah berjalan saat ini, serta merumuskan alternatif kebijakan 3in1 untuk kebutuhan tenaga kerja dalam negeri. Metode penelitian yang digunakan untuk memuskan alternatif kebijakan 3in1 untuk kebutuhan tenaga kerja dalam negeri dilakukan melalui metode AHP (The Analytic Hierarchy Process).

Berdasarkan hasil analisa diketahui bahwa selama ini upaya yang dilakukan dalam mengatasi pengangguran masih bersifat partial dan sektoral artinya bahwa masing-masing lembaga masih berjalan sendiri-sendiri tanpa menjalin koordinasi atau hubungan kemitraan yang menimbulkan sinergisitas. Pemilihan sasaran sebagai prioritas kebijakan 3in1 untuk kebutuhan tenaga kerja dalam negeri untuk dilaksanakan menurut penilaian keempat responden berdasarkan hasil sintesa prioritas lokal adalah meningkatkan koordinasi antara lembaga pelatihan, sertifikasi dan penempatan dalam negeri dengan bobot sebesar 0.550. Sedangkan pemilihan program sebagai prioritas kebijakan 3in1 untuk kebutuhan tenaga kerja dalam negeri adalah program membangun sistem dan kelembagaan koordinasi pelaksanaan kebijakan 3in1 oleh para stakeholder dengan bobot sebesar 0.584.

A number of unemployment in Indonesia is about 9.43 million people or equivalent to 8.46% from total of Indonesia labor forces. In the other hand their qualities and competencies are still low, it is around 4.92 million people or equivalent to 52.17% under junior high school graduations. It means more than 50% of Indonesia labor forces are dominated under junior high school graduations. While the Vocational Training Centers (VTC) in Indonesia have not been in good condition, so that the graduations of VTC are not appropriate with the industry needs. In other word there are mismatch between the VTC graduations with work market needs.

One of government policy to overcome the unemployment in Indonesia is to implement the 3in1 program.

The 3in1 program policy is a penetration strategy for linking and empowering the training, certification and placement institutions to be in one integrated system in decreasing unemployment. The three institutions must be carried out in one coordination but in the implementation its coordination has not been carried out comprehensively. The purpose of this research is to describe the current condition of Bin] program implementation for the domestic labor demands and to formulate the alternative of 3in1 policy for the domestic labor demands. Research method of formulating the alternative of 3in1 policy for the domestic labor demands uses AHP method (The Analytic Hierarchy Process).

Based on the analysis result, it is found that until now the efforts which have been done in handling unemployment are still in partial or sector manner. It means that each institutions still run by themselves without coordination or relationship which emerge a good synergy. Selecting the objectives as a priority of 3in1 policy for the domestic labor demands according to all respondents in local priority synthetic result is to increase the coordination between training, certification and domestic placement institutions with grade 0.550. While selecting program as a priority of 3in1 policy for the domestic labor demands is to establish a system and coordination institution of implementing 3in1 policy by all stakeholders with grade 0.584.</i>